

**EFEKTIVITAS BANTUAN JAMINAN SOSIAL EKONOMI TERHADAP
KEMANDIRIAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA MAKASSAR**

Rasidin Calundu^{1*}, Musdalifa²
STIA AL Gazali Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia
[rasidincalundu564@gmail.com^{1*}](mailto:rasidincalundu564@gmail.com)

Manuskrip: Desember-2022; Ditinjau: Desember-2022; Diterima: Desember-2022; Online: Januari -2023;
Diterbitkan: Januari-2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas bantuan jaminan sosial ekonomi terhadap kemandirian masyarakat prasejahtera Di KOTA MAKASSAR. Jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanganan kemiskinan belum optimal, penanganan kemiskinan masih bersifat sektoral belum secara holistik, artinya setiap dinas cenderung bekerja sendiri-sendiri sehingga seolah-olah seolah bahwa persoalan kemiskinan mutlak menjadi tanggung jawab dinas sosial, sedangkan dinas lain tidak bertanggung jawab, untuk itu perlu ada sinergitas antar departemen, instansi agar penanganan kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan sekaligus juga menekan angka kemiskinan.

Kata Kunci: Masyarakat, Miskin, Sejahtera, Ekonomi, Kebijakan

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of socio-economic security assistance on the self-sufficiency of the poor in MAKASSAR CITY. This type of qualitative research uses a phenomenological approach, while the results of the research show that the program for handling poverty is not yet optimal, handling poverty is still sectoral and not holistic, meaning that each agency tends to work independently so that it seems as if the problem of absolute poverty is the responsibility of the social service, while other agencies irresponsible, for this reason there needs to be synergy between departments, agencies so that the handling of people's welfare can be increased while also reducing the poverty rate.

Keywords: Community, Poor, Prosperous, Economy, Policy

I. PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan di Indonesia khususnya di kota Makassar menjadi pekerjaan rumah yang harus di tangani pemerintah kota Makassar, berbagai upaya telah dilakukan namun

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan, dalam konteks masyarakat kota Makassar masalah kemiskinan masih tergolong berat, karena bukan hanya mereka kurang makan, gizi dan tempat tinggal yang kurang layak huni, tapi lebih terkait pada aspek pikiran dan cara pandang yang keliru, ada perasaan nyaman kalau mereka di kenal sebagai orang miskin karena menjadi miskin berarti akan mendapat bantuan dari berbagai kalangan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Indonesia karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Pemerintah Kota Makassar yang berorientasi mengembangkan Makassar menjadi kota yang maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, defisit anggaran dan lain-lain. Sensus penduduk yang baru akan di mulai diduga akan mengalami peningkatan drastis.

dapat dianalisis melalui tingkat angkatan kerja, tingkat penduduk yang bekerja dan tingkat penduduk yang menganggur. Masalah kemiskinan yang dihadapi ini akan selalu dibarengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan kota Makassar maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini. Karena itu dalam makalah ini, penulis akan banyak membahas mengenai masalah kemiskinan di Makassar dan factor-faktor yang memicu terjadinya kemiskinan di Makassar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif melalui pendekatan fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang mengeksplorasi pengalaman subjektif yang dialami oleh individu tentang fenomena tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memahami fenomena tersebut, serta untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini biasanya menggunakan wawancara mendalam atau focus group untuk mengumpulkan data, dan menggunakan teknik-teknik analisis kualitatif seperti interpretasi, pengkodean, dan memoing untuk mengeksplorasi dan menafsirkan data tersebut..

III. HASIL PENELITIAN

Kemiskinan berdampak terhadap pola pemberdayaan masyarakat miskin. Kemiskinan di Indonesia adalah topik yang tidak pernah habis untuk di perbincangkan

dewasa ini. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang akan terus muncul dan sulit untuk dituntaskan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang harus di perhatikan dalam pembangunan, sebab salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini di tandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan

- A. Faktor-faktor penyebab kemiskinan sangat bervariasi, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya tingkat upah, adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum adanya kestabilan politik dan tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia. Pernyataan diatas diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar 70,81², atau jika dilihat dari indikator yang disusun United Nation Development Programme (UNDP), Indonesia masih berada di urutan 113 dari 188A negara di dunia.
- B. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warga Negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan empat prinsip utama. Pertama adalah pembangunan yang inklusif. Pembangunan mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Kedua adalah peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan, serta meningkatkan investasi modal manusia (human capital).

Dampak Kemiskinan

a. Pengangguran.

Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran di Indonesia begitu banyak. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki

penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Ukuran daya saing inilah yang kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global.

b. Kekerasan.

Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dapat dilakukannya. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu. Dari sinilah sebuah kemiskinan dapat berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat kebanyakan. Semakin tinggi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, semakin membahayakan juga lingkungan tempat tinggal mereka. Karena sebagai dampak kemiskinan, mereka akan berusaha mencari jalan pintas untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka.

c. Pendidikan

Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

d. Kesehatan

Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya sangat mahal. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Karena biaya yang mahal tersebut, berdampaklah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Dampak yang ditimbulkan inilah yang semakin memperparah kehidupan masyarakat miskin. Mereka kehilangan hak untuk mendapat fasilitas kesehatan karena mereka tidak mempunyai dana untuk membayar.

e. Konflik sosial

Tanpa bersikap munafik konflik sara muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami semuanya ini adalah ekspresi berontakan identitas diri setiap individu. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan. Kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan perlu diatasi dengan melibatkan peran serta banyak pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi. Dari sekian banyak strategi mengentaskan kemiskinan, pendekatan sosial entrepreneurship yang bertumpu pada semangat kewirausahaan untuk tujuan-tujuan perubahan sosial, kini semakin banyak digunakan karena dianggap mampu memberikan hasil yang optimal.

Upaya untuk memberdayakan orang miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanganan kemiskinan agar orang miskin dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke

dalam kemiskinan. Keempat adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin. Keempat prinsip di atas telah diterjemahkan dalam empat kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Kelompok pertama meliputi program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok kedua adalah kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan kelompok keempat adalah kelompok program pro rakyat. Keseluruhan program tersebut menunjukkan pemahaman komprehensif atas penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan tidak saja diarahkan sebagai bentuk intervensi langsung kepada individu dan rumah tangga miskin. Lebih dari itu, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan ditingkat komunitas (masyarakat), dan pula penting untuk dimaknai dengan penguatan kegiatan ekonomi yang berbasiskan sistem keuangan dan perbankan.

Sasaran penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut menjadi sekitar 6% dari seluruh penduduk. Besarnya anggaran dana dan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, diharapkan angka kemiskinan akan ditekan. Program-program pemerintah yang sudah dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan adalah membentuk TNP2KP (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

TNP2KP memiliki berbagai macam program yang terdiri dari 4 klaster, yaitu klaster I yang merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial dengan program utama Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), PKH (program keluarga Harapan), Raskin (Beras untuk keluarga miskin), dan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Program klaster II merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan program utamanya adalah PNPM mandiri (program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri).

Program klaster III merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan program utamanya adalah pemberian KUR (kredit usaha rakyat). Program Klaster IV kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negaranegara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya

. Salah satu langkah nyata adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan. Sebagaimana Presiden Joko Widodo saat mulai menjabat telah memproklamkan Program Nawacita yang berisi tentang 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Terdapat 2 (dua) Program Nawacita yang pro pada program pengentasan kemiskinan, yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk di atasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka Pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama hingga saat ini mengupayakan masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dapat menurun jumlahnya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 28.01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa.

Data pada BPS pun menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak terdapat di wilayah perdesaan daripada perkotaan. Berdasarkan data hingga bulan Maret 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen menjadi 14,11 persen dibanding pada periode yang sama pada tahun 2015 lalu. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia, dikarenakan terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis kebijakan terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, dimulai dari masa orde lama hingga masa pemerintahan saat ini.

1. Bentuk bantuan pemerintah dikota Makassar

Kehadiran sektor informal memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan perkotaan, karena dapat menunjang tersedianya lapangan pekerjaan dan merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi penduduk di kota. Mereka yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin kebanyakan dalam usia kerja utama (prime age) berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah dan sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal.

Sebagian kaum migran dalam sektor informal adalah penganggur atau tidak termasuk dalam angkatan kerja sebelum bermigrasi, tetapi kebanyakan kaum migran terdiri dari masyarakat yang berpindah dari sektor pertanian ke sektor yang non pertanian. Juga, kebanyakan kaum migran berasal dari daerah pedesaan. Di kota Makassar khususnya di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala yang sebagian masyarakatnya juga merupakan kaum migran, kebanyakan bekerja di sektor informal antara lain sebagai sopir, pedagang kaki lima, buruh bangunan, pengamen bahkan lebih banyak yang bekerja sebagai pemulung.

Kemiskinan di kota Makassar merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah kota Makassar sangat di perlukan. Menurut Soerjono soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Kemudian hal serupa juga di tambahkan dari pendapat Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Dinas Sosial dalam hal ini sebagai bagian dari lembaga pemerintah kota Makassar yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin. Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah

satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam pembahasan ini dapat secara rinci dijabarkan sebagai berikut: Terkait bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program ini awalnya merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk selanjutnya

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintah kota Makassar menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin yakni program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian bantuan berupa peralatan dan bahan sesuai dengan usaha yang diinginkan. Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program-program andalan Dinas Sosial kota Makassar dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin.

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni membantu keluarga miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pelaksanaan program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun program yang diupayakan pemerintah dalam memajukan pembangunan ekonomi yaitu program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal.

Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan salah satu kegiatan program pemberdayaan fakir miskin oleh dinas sosial kota Makassar dengan memberikan bantuan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif atau memberikan bantuan modal berupa alat dan bahan untuk usaha yang akan di geluti, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi keluarga fakir miskin sehingga mampu bangkit dari keterpurukan. Program bantuan UEP merupakan media yang strategis, efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi keluarga fakir miskin sebagai bentuk perwujudan dari amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2), serta Undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Program UEP diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mendorong pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga fakir miskin untuk berkembang. Sasaran penerima bantuan UEP diprioritaskan kepada keluarga fakir miskin yang terdaftar pada kantor kecamatan atau kelurahan. Sasaran Out Come dari kegiatan UEP adalah meningkatnya kegiatan usaha masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, meningkatnya pendapatan serta berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak La heru selaku Kepala seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, beliau menyatakan bahwa : “UEP merupakan program dinas sosial untuk memberdayakan keluarga miskin dalam bentuk bantuan modal usaha. Modal usaha ini berupa peralatan dan bahan untuk usaha mereka nantinya.”

Beliau juga menambahkan bahwa : “usaha yang akan mereka jalankan nantinya disesuaikan dengan kemampuan si penerima bantuan ini misalnya masyarakat ini bisa memasak gorengan maka nantinya bantuannya berupa peralatan dan bahan untuk

membuat gorengan.” Pendapat serupa juga dinyatakan oleh informan lainnya yaitu ibu Sitti hajar selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Makassar, beliau menyatakan bahwa: “Program bantuan UEP merupakan salah satu program kami untuk membantu keluarga fakir miskin untuk meningkatkan perekonomian keluarganya supaya mampu melengkapi kebutuhan sehari-harinya.”
Government: Jurnal Ilmu P

Program selanjutnya yang dilakukan pemerintah yaitu program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Kemensos RI, 2011).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Burhanuddin Ghalib selaku kepala bidang jaminan bantuan dan pengendalian kesejahteraan sosial dinas sosial kota Makassar, beliau menyatakan bahwa: “KUBE adalah kelompok usaha bersama yang dimaksudkan yakni kumpulan keluarga miskin yang membentuk suatu kelompok usaha untuk tumbuh, berkembang dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain serta tinggal di wilayah yang sama.

Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas anggotanya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Kemudian dalam bidang kami ada yang disebut seksi pemberdayaan fakir miskin yang mengurus masalah-masalah keluarga miskin melalui program-program kami inilah yang menjadi solusi untuk masalah tersebut salah satunya adalah program KUBE ini.” Dari penuturan dari informan diatas, dapat dikatakan bahwa program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan sarana koordinasi dan kolaborasi yang produktif sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan yakni pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin.

2. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Makassar

Kemiskinan di kota Makassar ini merupakan masalah yang sangat penting untuk di atasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka dari itu peran pemerintah kota Makassar sangat di perlukan. Dinas Sosial dalam hal ini sebagai bagian dari lembaga pemerintah kota Makassar yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan, antara lain melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan fakir miskin.

Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menangani kemiskinan bukan hanya dari dinas sosial saja, dari dinas kesehatan juga perlu untuk menangani masalah kesehatan masyarakat, dari dinas pendidikan yang bertanggung jawab bagi anak sekolah yang tidak mampu dengan memberikan bantuan, orang miskin jika dilihat dari rumahnya yang bertanggung jawab yaitu dinas perumahan, dan dari BUMN sendiri ia memberikan bantuan elpiji gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.”

Adapun beberapa tahap yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam menanggulangi kemiskinan dengan menerapkan beberapa program, antara lain menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar,

membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Beberapa tahap telah disebutkan agar jumlah kemiskinan di kota Makassar dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Tahap pertama dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dapat dijalankan dalam suatu program yang bertujuan untuk menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras, tahap kedua dengan mendorong pertumbuhan pihak pada rakyat miskin ini ditujukan agar masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk membangun suatu usaha yang lebih luas dengan cara bertahap, tahap ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupannya dalam membangun masyarakat untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi di kawasan perkotaan dalam ruang lingkup kemiskinan untuk memperkuat penyediaan dukungan dalam pengembangan berusaha bagi penduduk miskin, kemudian tahap keempat yaitu akses masyarakat harus ditingkatkan pelayanan dasarnya untuk lebih fokus dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasarnya, untuk ditahap akhir kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin tersebut dalam menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.

Adapun beberapa upaya telah di laksanakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terjadi di kota Makassar yaitu membiayai keluarga bagi yang mempunyai anak sekolah yang tidak memiliki dana untuk menempuh pendidikan, program kesehatan bagi ibu hamil/balita yang akan dibiayai oleh pemerintah bagi orang yang tidak mampu, membiayai kehidupan lansia yang berusia diatas 70 tahun dengan memberikan bantuan kepadanya, memberikan bantuan untuk disabilitas berat/cacat berat yang dimana semua komponen atau penyakit yang membuat orang itu tidak bisa berdaya apa-apa, contoh lumpuh seluruh badan.

kelemahan dan kelebihan program KUBE. KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yang terdiri dari Kepala Keluarga-Kepala Keluarga fakir miskin adapun kelebihan dan kelemahan pada program ini seperti :

Kelebihan dari program kube

- a) Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan basil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya
- b) Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan ketrampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu
- c) Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panitia Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS)

Kelemahan program kube

Kube sendiri merupakan program yang disediakan pemerintah kota makasaar dalam mengatasi kemiskinan, namun pada program ini masi terdapat beberapa kelemahan Hasil kajian dilapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi

KUBE meliputi :

- a) Kurangnya modal kerja
- b) Tidak berfungsinya pengurus KUBE
- c) Kurang kompaknya anggota KUBE,
- d) Kurangnya dukungan dari Pemerintah,
- e) Rendahnya Teknologi,
- f) Kurang kekompakan anggota dalam penentuan harga
- g) belum ada kemitraan.

3. Strategi Pemerintah Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat

Perkembangan global yang begitu dahsyat membawa pengaruh dalam pranata sosial dan berimplikasi pada nilai-nilai yang bergeser karena adanya perubahan kebutuhan manusia, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terhadap pembangunan ekonomi nasional, dimana Indonesia menganut perekonomian terbuka dan menjalankan perekonomiannya dengan menciptakan interaksi dari pihak swasta maupun negara lain.

Pembangunan dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan tujuan dari Pancasila yang merupakan dasar negara, dimana pemerintah dituntut untuk berlaku adil terhadap tiap-tiap warga negara dengan cara menstabilkan atau meningkatkan kehidupan masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka dari itu pemerintah mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dirumuskan untuk mengembangkan industri yang menjadi acuan besar pendapatan ekonomi negara. Salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan pendapatan besar bagi negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka dari itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan UMKM (Guntur et al., 2019).

Pemerintah telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk membangun usaha yakni, penerapan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam hal perekonomian yang lebih maju. Keberadaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimana Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada 1997- 1998 silam telah memperkuat kedudukan potensi pengembangan UMKM.

Dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang usaha mikro mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan usaha melalui program pemberdayaan usaha mikro, seperti di negara-negara lain usaha mikro yang biasa disebut sebagai bisnis keluarga memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah setempat dan diberi kemudahan untuk memperoleh akses yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar memiliki banyak daya tarik dalam berbagai sektor ekonomi yang mampu meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga diperlukan strategi pemberdayaan UMKMyang mampu menumbuhkan tingkat persaingan UMKM di Kota Makassar yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 17 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, peraturan daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada koperasi dan usaha kecil yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa program berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan UMKM yang diadakan pada tahun 2019, yaitu:

- a) bimtek pola pengelolaan limbah rumah tangga untuk UMK
- b) bimtek teknik pengelolaan warung makan
- c) fasilitasi pemasaran produk UMKM dengan pelaku bisnis
- d) pengembangan pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha jasa Laundry
- e) pemanfaatan informasi teknologi dalam peningkatan kualitas UKM
- f) peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM
- g) lomba lorong UKM
- h) sentra Galeri produk unggulan koperasi dan UKM
- i) penyelenggaraan promosi produk unggulan, dan
- j) workshop peningkatan pengelolaan keuangan UMKM.

Usaha Mikro, Keci, dan Menengah merupakan sektor usaha yang terbukti telah memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi untuk mendorong perekonomian negara secara regional dan nasional. Sektor usaha juga menjadi unggul dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah. Secara khusus, Kota Makassar yang merupakan pusat perekonomian di Sulawesi Selatan memiliki peluang yang sangat banyak dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu langkah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Makassar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan kemiskinan tidak bisa berdiri sendiri, kompleksnya persoalan kemiskinan dimana masyarakat miskin buka saja kekurangan dari segi makanan,uang,rumah,merekajuga miskin dari segi wawasan,pergaulan, miskin dari segi ilmu dan miskin dari segi pemahaman, sehingga banyak yang berfikir bahwa menjadi orang miskin merupakan pintu gerbang dari banyaknya sumbangan dan bantuan bagi mereka, sehingga penanganan kemiskinan harus melibatkan berbagai bidang dan dinas yang terkait dalam satu komando kepemimpinan yang terintegratif, juga penanganan kemiskinan haru juga melibatkan dunia pendidikan dan dunia usaha dan lain lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aath-Thawil. Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim diterjemah Muhammad Bagi. ; cet .1. Bandung : Mizan, 1985 Ahmad, Abu. Ilmu Sosial Dasar .Jakarta:
- Agussalim. 2009. Mereduksi Kemiskinan, Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia. Makassar:
- Edwards III, George C. 1980.Implementing Public Policy.Washington DC: Congressional Quarterly Press. Jacques, Jean Rousseau. 1986. Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo. Jakarta: Erlangga.

- Efendi, Tadjuddin Noer. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1993. Huda, Nurul. dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Nala Cipta Litera. Arief, Hasrat, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. BPS (Badan Pusat Statistik). 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2014. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Ndraha, Talidziduhu. 2003, Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Ndraha, Talidziduhu. 2003.
- Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Renika Cipta. 2003. Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlangga. 2002.
- Setiadi, Elly M., Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Jakarta : Prenamedia Group, 2011.
- Sudarwati, Nanik. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran Kemiskinan. Malang : Intimedia. 2009.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumar'in, Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif ekonomi Islam , Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Suparlan, Parsudi. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1995.
- Suwarsono, Sri Edi. Sekitar Kemiskinan dan Keadilan. Jakarta: Cendikiawan Tentang Islam UI Press. 2007.